



**GUBERNUR
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 701 TAHUN 2024

TENTANG

**PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PELAKSANAAN PENEMPATAN
JARINGAN UTILITAS PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL SISTEM HILIR
SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Direktur Jenderal Cipta Karya Direktorat Air Minum Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat tanggal 6 Januari 2023 Nomor PR.0101-Ca/03 hal Permohonan Pembebasan Biaya Retribusi Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas (IPPJU) untuk Kegiatan SPAM Regional Jatiluhur I dan Spam Regional Karian Serpong Provinsi DKI Jakarta, kegiatan SPAM Regional Jatiluhur I termasuk dalam Proyek Strategis Nasional sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional;
- b. bahwa setelah dilakukan pemeriksaan dan penelitian berkas, permohonan pembebasan retribusi izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas pada Proyek Strategis Nasional Sistem Hilir Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional Jatiluhur I sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sesuai dengan ketentuan Pasal 96 ayat (3) huruf e Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak dan Retribusi Daerah serta Pasal 2 ayat (5) Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah, Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan retribusi daerah atas permohonan dari wajib retribusi dengan mempertimbangkan fungsi objek retribusi salah satunya untuk mendukung kebijakan Pemerintah dalam mencapai program prioritas nasional;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pemberian Pembebasan Retribusi Izin Pelaksanaan Penempatan Jaringan Utilitas pada Proyek Strategis Nasional Sistem Hilir Sistem Penyediaan Air Minum Regional Jatiluhur I;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 259);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1034) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Daftar Proyek Strategis Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 675);

7. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2041);
8. Peraturan Gubernur Nomor 188 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2015 Nomor 61022);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL SISTEM HILIR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL JATILUHUR I.
- KESATU :** Menetapkan pemberian pembebasan retribusi izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas pada Proyek Strategis Nasional Sistem Hilir SPAM Regional Jatiluhur I.
- KEDUA :** Pembebasan retribusi izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas pada Proyek Strategis Nasional Sistem Hilir SPAM Regional Jatiluhur I diberikan kepada Direktur Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Air Minum.
- KETIGA :** Pembebasan retribusi izin pelaksanaan penempatan jaringan utilitas pada Proyek Strategis Nasional Sistem Hilir SPAM Regional Jatiluhur I sebagaimana dimaksud diktum KEDUA diberikan sesuai dengan daftar lokasi dan informasi penempatan jaringan utilitas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEEMPAT :** Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2024

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO

Tembusan:

1. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia
u.p. Direktur Jenderal Cipta Karya
2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

3. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda
Provinsi DKI Jakarta
4. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda
Provinsi DKI Jakarta
5. Inspektur Provinsi DKI Jakarta
6. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sumber Daya Air Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Badan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
14. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda
Provinsi DKI Jakarta
15. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda
Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 701 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERIAN PEMBEBASAN RETRIBUSI IZIN
PELAKSANAAN PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS
PADA PROYEK STRATEGIS NASIONAL SISTEM
HILIR SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM REGIONAL
JATILUHUR I

DAFTAR LOKASI DAN INFORMASI PENEMPATAN JARINGAN UTILITAS

No.	Nama Paket	Nama Perusahaan	Pelaksana	Lokasi
1.	PAKET 1	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	KSO WASKITA - INFRA	Jln. Sawo Kecik
				Jln. Raya Damai
				Jln. BKT 1
				Jln. H. Naman
				Jln. Robusta Raya
				Jln. Malaka Baru
				Jln. RS Polri Soekanto
				Jln. BKT
				Jln. Robusta Raya Gg1
				Jln. Malaka Baru I
				Jln. Malaka Baru Ia
				Jln. Malaka Baru Ib
				Jln. Malaka Baru II
				Jln. Malaka Baru III
				Jln. Malaka Baru IIIa
				Jln. Malaka Baru IIIb
				Jln. Karya Bakti
				Jln. Karya Bakti A
				Jln. Karya Bakti B
				Jln. Karya Bakti B1
				Jln. Karya Bakti B2
				Jln. Karya Bakti B3
				Jln. Karya Bakti B4
				Jln. Karya Bakti B5
				Jln. Karya Bakti B6
				Jln. Karya Bakti B7
				Jln. karya Bakti B8
				Jln. karya Bakti B10
				Jln. Karya Bakti B11
				Jln. Karya Bakti B12
				Jln. Karya Bakti B13
				Jln. Karya Bakti B14
				Jln. Karya Bakti B15
				Jln. Karya Bakti B16
				Jln. Karya Bakti Gg. I
				Jln. Karya Bakti IV
				Jln. Bojong Rangkong
				Jln. Sekolahan
				Jln. Sekolahan I
				Jln. Haji Asmat
				Jln. Haji Asmat I
				Jln. Haji Asmat II
				Jln. Gang H. Enteng I
				Jln. Gang Soneta

No.	Nama Paket	Nama Perusahaan	Pelaksana	Lokasi
				Jln. H. Sauwih
				Jln. H. Sauwih I
				Jln. I Gusti Ngurah Rai
				Jln. Bintara Jaya
				Jln. Bintara Jaya I
				Jln. Bintara Jaya II
				Jln. Gang H. Toyan 2
				Jln. H. Toyan
				Jln. Arabika Atas
				Jln. Arabika
				Jln. Arabika Atas 1 A
				Jln. Arabika Atas 1 B
				Jln. Arabika Atas 1 C
				Jln. Arabika Atas 1 D
				Jln. Arabika Atas 2
				Jln. Arabika Gg. 1
				Jln. Arabika Gg. 2
				Jln. Arabika Gg. 3
				Jln. Kopi Liberika VI
				Jln. Rawa Jaya I
				Jln. Rawa Jaya I A
				Jln. Rawa Jaya I B
				Jln. Rawa Jaya I C
				Jln. Rawa Jaya I D
				Jln. Rawa Jaya II
				Jln. Rawa Jaya IV
				Jln. Rawa Jaya IVa
				Jln. Raya Pondok Kopi
				Jln. Raya Pondok Kopi Selatan
				Jln. Raya Pondok Kopi Gg. 1
				Jln. Raya Pondok Kopi Gg. 2
				Jln. Raya Pondok Kopi Gg. 3
				Jln. Raya Pondok Kopi Gg. 4
				Jln. Raya Pondok Kopi Gg. 5
				Jln. Raya Pondok Kopi Gg. 6
				Jln. Pondok Kelapa Residence Blok A
				Jln. Rawadas
				Jln. Rawadas 1
				Jln. Rawadas Gg. 1
				Jln. Rawadas Gg. 2
				Jln. Rawadas Gg. 3
				Jln. Rawadas Gg. 4
				Jln. Rawadas Gg. a
				Jln. Rawadas Gg. 5
				Jln. Rawadas Gg. 6
				Jln. Rawadas Gg. 7
				Jln. Rawadas Gg. 8
				Jln. Rawadas Gg. 9
				Jln. Rawadas Gg. 10
				Jln. Rawadas I
				Jln. Rawadas I Gg. a
				Jln. Rawadas I Gg. b
				Jln. Rawadas I Gg. c
				Jln. Rawadas I Gg. d
				Jln. Rawadas I Gg. e

No.	Nama Paket	Nama Perusahaan	Pelaksana	Lokasi
				Jln. Rawadas I Gg. f
				Jln. Rawadas I Gg. g
				Jln. Rawadas II
				Jln. Rawadas III
				Jln. Rawadas IV
				Jln. Rawadas V
				Jln. Bina Karya
				Jln. Bina Karya I
				Jln. Bina Karya Gg. 1
				Jln. Bina Karya Gg. 2
				Jln. Bina Karya Gg. 3
				Jln. Rawa Bahagia
				Jln. Rawa Bahagia Gg. 1
				Jln. Gang Mustika 1
				Jln. Gang Mustika 3
				Jln. Gang Mustika 4
				Jln. Gang Mustika 5
				Jln. Masjid Al Furqon
				Jln. Masjid Al Furqon Gg. 1
				Jln. Masjid Al Furqon Gg. 2
				Jln. Rawa Wadas
				Jln. Rawa Wadas a1
				Jln. Rawa Wadas a2
				Jln. Rawa Wadas a3
				Jln. Rawa Wadas a4
				Jln. Rawa Wadas a5
				Jln. Rawa Wadas a6
				Jln. Rawa Wadas a7
				Jln. Gang Mushola II
				Jln. Gang Mushola III
				Jln. Gang Mushola IV
				Jln. Gang Mushola V
				Jln. Gang Swadaya II
				Jln. Gang Madrasah I
				Jln. Gang Madrasah II
				Jln. Gang Madrasah III
				Jln. Gang Madrasah IV
				Jln. Gang Madrasah IV a
				Jln. Gang Madrasah IV b
				Gang Gemilang 1
				Gang Gemilang 2
				Gang Gemilang 3
				Gang Gemilang 4
				Gang Gemilang 4a
				Gang Gemilang III
				Gang Gemilang 5
				Jln. H. Mansur
				Jln. Gang H. Sipan
				Jln. Gang Gantong
				Jln. Gang Gantong III
				Jln. Gang Gantang 1
				Jln. Gang Gantang 2
2.	PAKET 2	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	WIKAJAYA KONSTRUKSI KSO	Jln. Sawo Kecil

No.	Nama Paket	Nama Perusahaan	Pelaksana	Lokasi
3.	PAKET 3	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	PT. MINARTA DUTAHUTAMA	Jln. Damai
				Jln. Warga Bakti
				Jln. Inspeksi BKT
4.	PAKET 4	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	PT. CIPTA CROWN SIMBOL	Jln. Inspeksi Kanal Timur
5.	PAKET 5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	ADHI - NINDYA KSO	Jln. Rorotan
				Jln. Komp. SLTP 200
				Jln. Cakung Cilincing Raya
				Jln. Underpass Inspeksi Kirana
				Jln. Cakung Drainase
6.	PAKET 5	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	ADHI - NINDYA KSO	Jln. Rorotan 1
				Jln. Komp. SLTP 200
				Jln. Cakung Cilincing Raya
				Jln. Inspeksi Kanal Timur
7.	PAKET 6	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia	PT. DUTA RAMA	Jln. Underpass Inspeksi Kirana
				Jln. Inspeksi kirana
				Jln. Rorotan-Marunda
				Jln. Sarang Bango
				Jln. Sungai Tiram
				Jln. Raya Gudang Peluru
				Jln. Inspeksi BKT
				Jln. Rorotan IV
				Kampung Bambu Kuning
				Kampung Sepatan
				Jln. Bhakti
				Kampung Bulak Cabe
				Kampung Sungai Landak
				Kampung Rawa Malang
				Jln. Marunda 1
				Jln. Malaka Jaya
				Cakung Timur
				Ujung Menteng



Pj. GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

HERU BUDI HARTONO